

ANALISIS PERKEMBANGAN KONDISI KEMISKINAN DI PROVINSI RIAU

Azharuddin M. Amin¹, Saipul Bahri¹, Ratna Setianingsih² dan Ernawati²

Program Studi Manajemen Agribisnis
Fakultas Pertanian, Universitas Islam Riau
Jl. Kaharuddin Nasution 113 Perhentian Marpoyan Pekanbaru-Riau
email : azharuddin@agr.uir.ac.id
asrib@gmail.com
bahri.sp@agr.uir.ac.id

Abstrak

Kemiskinan menjadi isu utama dalam pembangunan sosial ekonomi. Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin Provinsi Riau pada tahun 2015 sebanyak 562.920 jiwa (8,82%). Tingginya angka kemiskinan tersebut merupakan masalah dan prioritas yang harus diselesaikan dalam pembangunan provinsi Riau. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan kondisi kemiskinan di Provinsi Riau. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan data time series 2002-2015. Data dianalisis dengan menggunakan 4 indikator yaitu garis kemiskinan, persentase penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan. Sedangkan komponen yang dianalisis adalah posisi relatif, analisis perkembangan antar waktu, analisis efektifitas dan analisis relevansi serta intervensi prioritas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan mengalami penurunan sebesar 5,49% dari 13,61% pada tahun 2002 menjadi 8,82% pada tahun 2015 dan lebih rendah 2,31% dari tingkat kemiskinan nasional sebesar 11,13%. Indeks P1 menurun dari 2,01 pada tahun 2002 menjadi 1,45 pada tahun 2015 dan lebih rendah dari P1 nasional sebesar 1,84%. Indeks P2 menurun dari 0,79 pada tahun 2002 menjadi 0,41% pada tahun 2015 dan lebih rendah dari P2 nasional sebesar 0,51%. Walaupun perkembangan antara waktu, posisi relatif, dan intervensi, efektifitas kebijakan penanggulangan kemiskinan mengalami perbaikan capaian indikator namun relevansi kebijakan belum sepenuhnya selaras dengan target nasional sehingga prioritas intervensi dalam penanggulangan kemiskinan kedepan harus lebih lokus dan fokus pada determinan kemiskinan terutama pembentuk peningkatan pengeluaran belanja makanan dan non makanan.

Kata kunci: Kemiskinan, Kebijakan, Penanggulangan.

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah kompleks dan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi tetapi juga kegagalan memenuhi hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Indonesia bersama 193 negara lain di dunia telah menyepakati resolusi yang dicetuskan dalam *Agenda for Sustainable Development* tahun 2030 yang diadakan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk pengurangan kemiskinan, kelaparan, perbaikan pendidikan, pemberdayaan perempuan, kesehatan dan kelestarian lingkungan, yang dijabarkan secara praktis dalam *Sustainable Development Goals* (SDG's).

Semangat SDG's tersebut sangat berguna untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di Indonesia dan provinsi Riau khususnya. Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2015 sebanyak 28,51 juta jiwa atau 11,31%. Dari jumlah penduduk miskin tersebut, sebanyak 17,89 juta jiwa dengan tingkat kemiskinan 14,09% tinggal di pedesaan dan sebanyak 10,62 juta jiwa dengan tingkat kemiskinan 8,22% tinggal di perkotaan. Demikian halnya di Provinsi Riau, jumlah penduduk miskin pada

Seminar Nasional "Mitigasi Dan Strategi Adaptasi Dampak Perubahan Iklim Di Indonesia"

tahun 2015 sebanyak 562.920 jiwa (8,82%) yang berdomisili di perdesaan sebanyak 9,95% dan di perkotaan sebanyak 7,05. Tingginya angka kemiskinan terutama di perdesaan tersebut menjadikan penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas utama dalam pembangunan nasional dan provinsi Riau. Dari data tersebut memberikan gambaran bahwa saat ini masih terdapat kesenjangan pembangunan antar wilayah yang sangat tajam terutama antar kota dan desa. Oleh sebab itu permasalahan kemiskinan yang kompleks di dihadapi seluruh negara di dunia termasuk Indonesia dan provinsi Riau yang penanganannya membutuhkan campur tangan berbagai pihak, baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat.

Secara nasional, penanggulangan kemiskinan menghadapi *triple-track problem*, yaitu kemiskinan yang meskipun terus menurun secara relatif, tetapi secara nominal meningkat. Kedua, kerentanan kemiskinan, yaitu banyaknya penduduk miskin di sekitar Garis Kemiskinan (GK) yang mengakibatkan mudahnya kelompok yang berada di atas GK jatuh ke bawah GK. Ketiga, kesenjangan baik antar wilayah provinsi dan kabupaten kota maupun kesenjangan pendapatan atau konsumsi antar penduduk secara keseluruhan dan antar penduduk miskin (indeks keparahan kemiskinan). Dengan tantangan tersebut, penanggulangan kemiskinan perlu ditingkatkan akselerasinya.

Upaya menanggulangi kemiskinan telah dilakukan beberapa cara diantaranya dengan memberikan bantuan pangan, bantuan pembiayaan kesehatan, pendidikan, perluasan kesempatan kerja dan pembangunan berbagai sektor yang menyangkut erat dengan lapangan pekerjaan keluarga miskin seperti sektor pertanian. Bahkan pemberian bantuan langsung tunai juga telah ditempuh sebagai bagian dari upaya menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Namun penurunan jumlah penduduk miskin belum memperlihatkan kemajuan yang cukup berarti yang disebabkan karena komitmen berbagai pihak dan keterpaduan berbagai program dan kegiatan dalam menangani masalah kemiskinan terutama ketepatan fokus dan lokus penganggaran yang belum sesuai dengan *outcome* indikator kemiskinan.

KAJIAN PUSTAKA

Todaro (2006) memperlihatkan jalinan antara kemiskinan dan keterbelakangan dengan beberapa aspek ekonomi dan aspek non ekonomi. Tiga komponen utama sebagai penyebab keterbelakangan dan kemiskinan masyarakat, faktor tersebut adalah rendahnya taraf hidup, rendahnya rasa percaya diri dan terbatasnya kebebasan. Ketiga aspek tersebut memiliki hubungan timbal balik. Rendahnya taraf hidup disebabkan oleh rendahnya tingkat pendapatan, rendahnya pendapatan disebabkan oleh rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja, rendahnya produktivitas tenaga kerja disebabkan oleh tingginya pertumbuhan tenaga kerja, tingginya angka pengangguran dan rendahnya investasi perkapita. Tingginya angka pengangguran disebabkan oleh tingginya tingkat pertumbuhan tenaga kerja dan rendahnya investasi perkapita, dan tingginya pertumbuhan tenaga kerja disebabkan oleh penurunan tingkat kematian dan rendahnya investasi perkapita disebabkan oleh tingginya ketergantungan terhadap teknologi asing yang hemat tenaga kerja. Selanjutnya rendahnya tingkat pendapatan berpengaruh terhadap tingkat kesehatan, kesempatan pendidikan, pertumbuhan tenaga kerja dan investasi perkapita.

Kuncoro (1997) mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum. Amartya Sen dalam Anggraeni (2009) berpendapat bahwa kemiskinan merupakan ketiadaan satu atau beberapa kemampuan dasar yang diperlukan untuk memperoleh fungsi minimal dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini termasuk tidak memiliki pendapatan yang memadai untuk memperoleh cukup makanan, pakaian, tempat berlindung (kemiskinan karena pendapatan) atau tidak mampu mengobati penyakit ke sarana kesehatan yang ada (kemiskinan karena kesehatan yang buruk), juga tidak memiliki akses terhadap pendidikan, partisipasi politik, atau peran di dalam masyarakat.

Badan Pusat Statistik mendefinisikan kemiskinan dengan dua cara yaitu ukuran pendapatan dan ukuran non pendapatan (Bappenas, 2016). Ukuran pendapatan adalah kemiskinan dilihat dari tingkat pendapatan/pengeluaran individu untuk memenuhi konsumsi/kebutuhan pokok minimum masyarakat. Batas pemenuhan kebutuhan minimum mengacu pada rekomendasi Widyakarya Nasional dan Gizi tahun 1978, yaitu nilai rupiah dari pengeluaran untuk makanan yang menghasilkan energi 2.100 kilo kalori per kapita setiap hari. Sedangkan ukuran non-pendapatan adalah rendahnya tingkat konsumsi/akses masyarakat kepada pelayanan dasar seperti: (1) perumahan; (2) pendidikan; (3) pelayanan kesehatan; (4) fasilitas sanitasi dan layanan air bersih; dan (5) keterbatasan terhadap akses pendanaan dan kapasitas usaha, dan lain-lain.

Apabila memperhitungkan semua dimensi kesejahteraan dengan tingkat konsumsi yang memadai, kerentanan yang berkurang, pendidikan, kesehatan dan akses terhadap infrastruktur dasar maka hampir separuh rakyat Indonesia dapat dianggap telah mengalami paling sedikit satu jenis kemiskinan. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia dan khususnya provinsi Riau memang telah mencapai beberapa kemajuan di bidang indek pembangunan manusia, tetapi aspek pelayanan dasar masih banyak yang perlu mendapatkan perhatian serius seperti dibidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, ketenagakerjaan dan perekonomian dan kebutuhan pangan.

Penanggulangan kemiskinan merupakan hasil komulatif dari lima aspek di atas sehingga keberhasilannya sangat tergantung pada proses dan capaian pembangunan aspek tersebut. Setiap upaya pembangunan dari aspek tersebut akan berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan di Provinsi Riau.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Data yang digunakan adalah data sekunder dalam bentuk data runtut waktu (*time series*) selama 14 tahun dari 2002-2015. Sumber data berasal dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Nasional dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Modul Konsumsi dan Survey Paket Komoditi Kebutuhan Dasar (SPKKD). Untuk mengukur perkembangan kondisi kemiskinan digunakan empat indikator terkait dengan pengeluaran rumah tangga miskin per kapita (BPS, 2011) antara lain:

a) Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan menunjukkan jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

$$GK = GKM + GKNM$$

Keterangan:

GK = Garis Kemiskinan

GKM = Garis Kemiskinan Makanan

GKNM = Garis Kemiskinan Non Makanan

b) Persentase Penduduk Miskin (P_0)

Persentase penduduk miskin adalah proporsi penduduk yang dikategorikan miskin. Persentase penduduk miskin yang tinggi menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di suatu wilayah juga tinggi.

$$P_0 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{Z - y_i}{Z} \right]^0$$

Keterangan:

P_0 = Persentase penduduk miskin

Z = Garis Kemiskinan

- y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ($I = 1, 2, \dots, q$), $y_i < z$
 q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan
 n = Jumlah penduduk

c) Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1)

Indeks kedalaman kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Penurunan nilai indeks kedalaman kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit.

$$P_1 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]$$

Keterangan:

P_1 = Indeks Kedalaman Kemiskinan

Z = Garis Kemiskinan

y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ($I = 1, 2, \dots, q$), $y_i < z$

q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan

n = Jumlah penduduk

d) Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2)

Indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

$$P_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^2$$

Keterangan:

P_2 = Indeks Keparahan Kemiskinan

Z = Garis Kemiskinan

y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ($I = 1, 2, \dots, q$), $y_i < z$

q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan

n = Jumlah penduduk

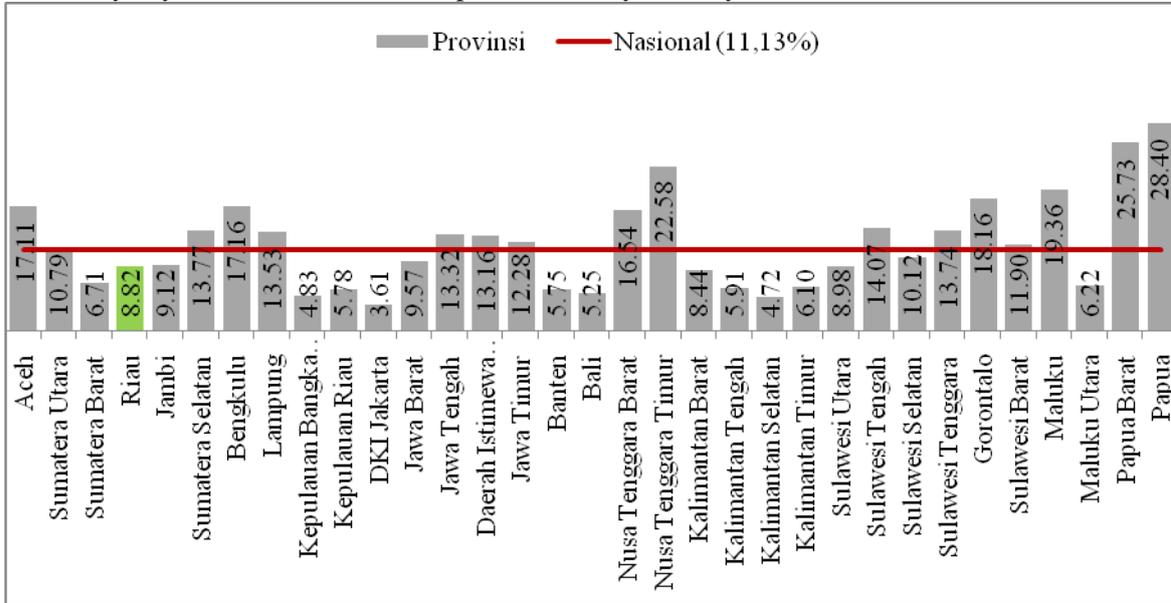
Berdasarkan hasil analisis empat indikator tersebut selanjutnya dilakukan analisis posisi relatif, perkembangan antar waktu, efektifitas, relevansi serta prioritas intervensi wilayah terhadap indikator kondisi kemiskinan tersebut yang disajikan dalam bentuk grafik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis perkembangan kondisi kemiskinan provinsi Riau, serta implikasi temuan tersebut pada kebijakan (program/kegiatan) penanggulangan kemiskinan di daerah. Analisis ini penting untuk dilakukan karena kemiskinan memiliki dimensi yang kompleks dan karakteristik yang cenderung bervariasi antar-daerah (*local-specific*). Oleh sebab itu, kondisi kemiskinan di daerah harus dapat diuraikan sedemikian rupa sehingga kebijakan intervensi untuk penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan secara lebih realistis sesuai apa yang menjadi masalah utama terhadap kondisi kemiskinan tersebut.

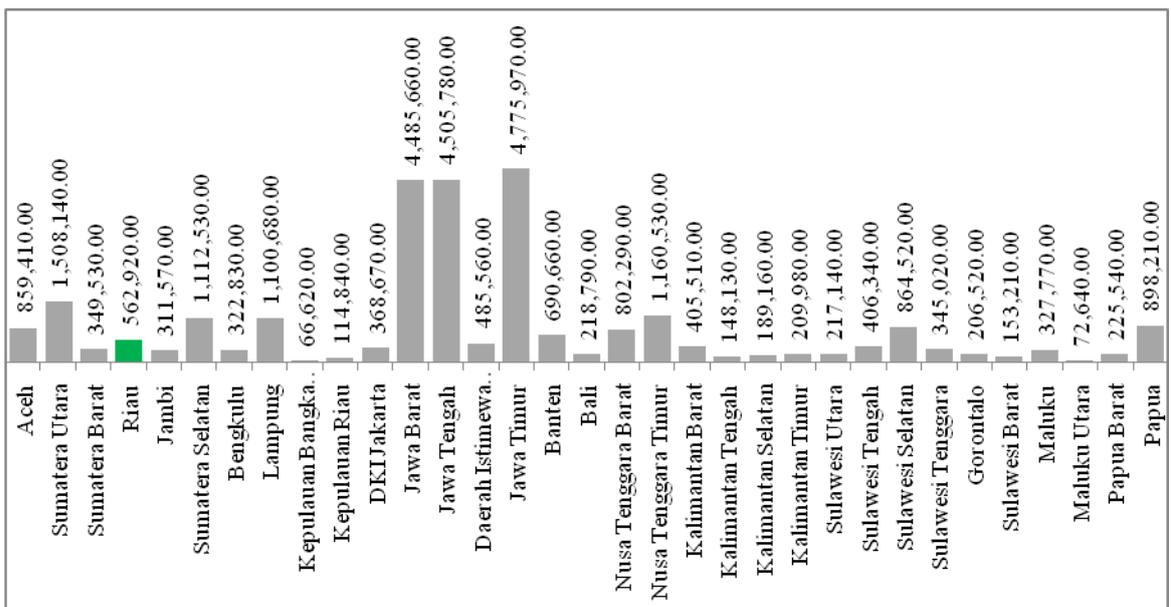
a) Analisis Posisi Relatif

Dari Gambar 1 terlihat persentase penduduk miskin di Provinsi Riau (8.82%) dibawah rata-rata nasional (11,13%). Posisi relatif tingkat kemiskinan di Provinsi Riau pada tahun 2015 terhadap total kemiskinan di Indonesia dan berada pada posisi 22 dari persentase penduduk miskin diantara 34 provinsi di Indonesia. Proporsi penduduk miskin provinsi Riau yang berdomisili di perdesaan lebih banyak yaitu sebesar 8,92% dan perkotaan hanya sebanyak 6,90%.



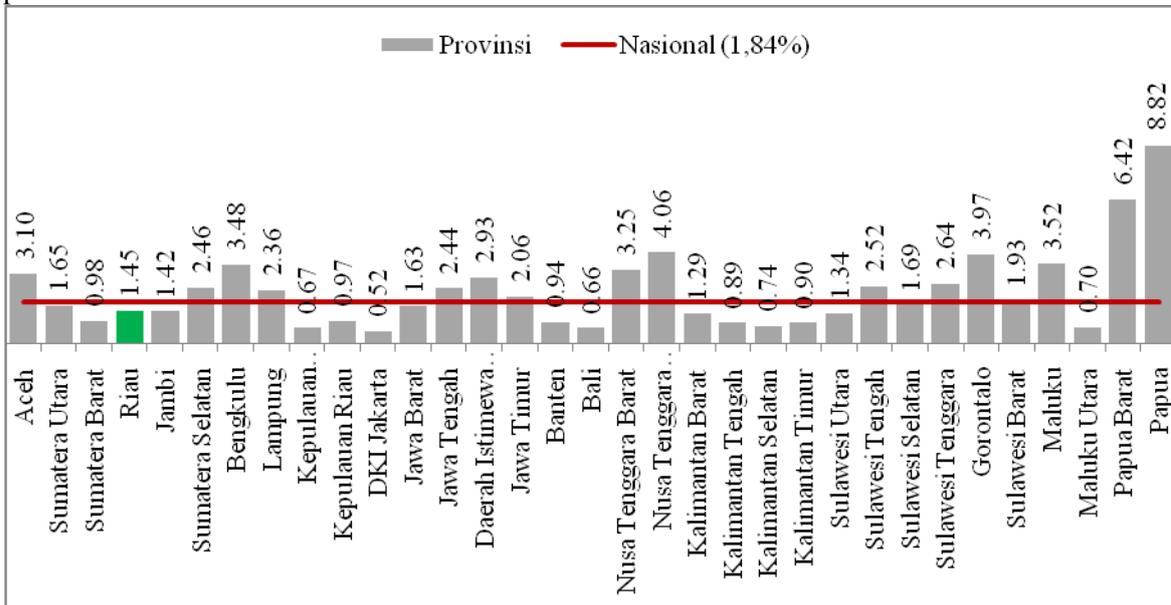
Gambar 1. Posisi Relatif Persentase Tingkat Kemiskinan Provinsi Riau Terhadap Nasional, 2015

Gambar 2 terlihat bahwa jumlah penduduk miskin Provinsi Riau pada 2015 sebanyak 562.920 jiwa dan menempati posisi 22 sebagai provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak dari 28.513.600 jiwa jumlah penduduk miskin Indonesia. Salah satu penyebab ramainya jumlah penduduk miskin Provinsi Riau adalah faktor penduduk migrasi masuk ke Riau yang cukup tinggi dan fluktuasi harga komoditas utama yang diusahakan masyarakat provinsi Riau.



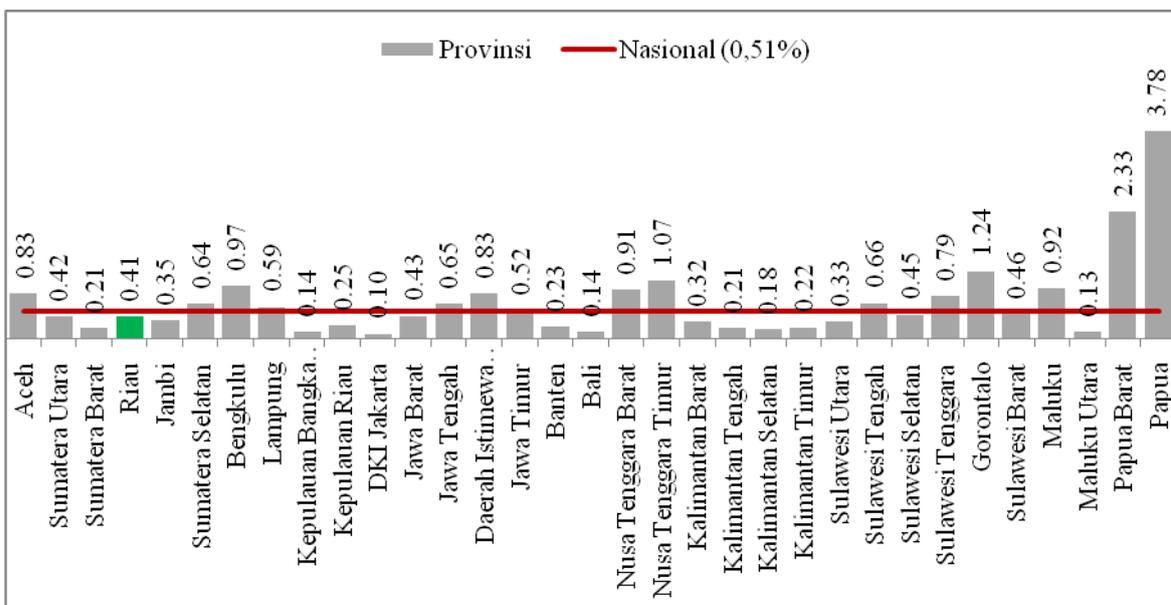
Gambar 2. Posisi Relatif Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) Provinsi Riau 2015

Pada gambar 3 terlihat bahwa posisi relatif P1 provinsi Riau sebesar 1,45% sementara nasional sebesar 1,84%, artinya P1 provinsi Riau berada di bawah rata-rata Nasional. Artinya rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan di provinsi Riau lebih rendah dari nasional.



Gambar 3: Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Riau 2015

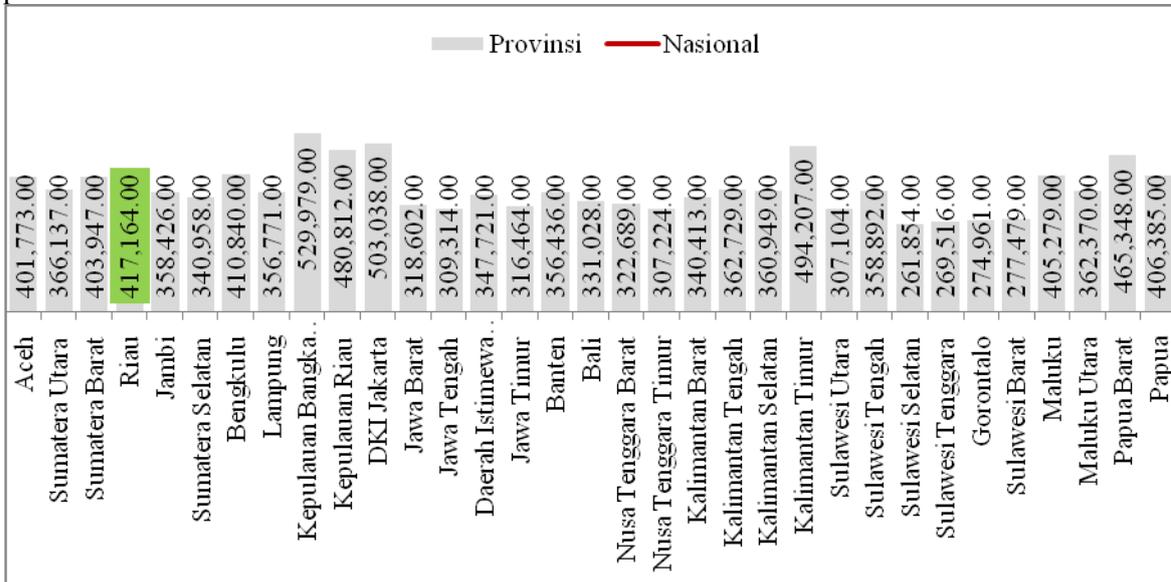
Gambar 4 menunjukkan bahwa posisi relatif P2 Provinsi Riau berada dibawah P2 nasional. Pada tahun 2015, indeks P2 Riau sebesar 0,41%, sedangkan indeks P2 nasional sebesar 0,51%. P2 provinsi Riau menempati urutan ke delapan terendah dibandingkan dengan provinsi di Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa penyebaran pengeluaran penduduk miskin di Provinsi Riau memiliki ketimpangan yang lebih sempit daripada nasional.



Gambar 4. Posisi Relatif Indeks Keperahan Kemiskinan (P2) Provinsi Riau 2015

Gambar 5 menunjukkan bahwa tingkat beban hidup atau Garis Kemiskinan di Provinsi Riau sebanyak Rp. 417.164 per kapita per bulan atau kebutuhan minimum bagi seorang untuk

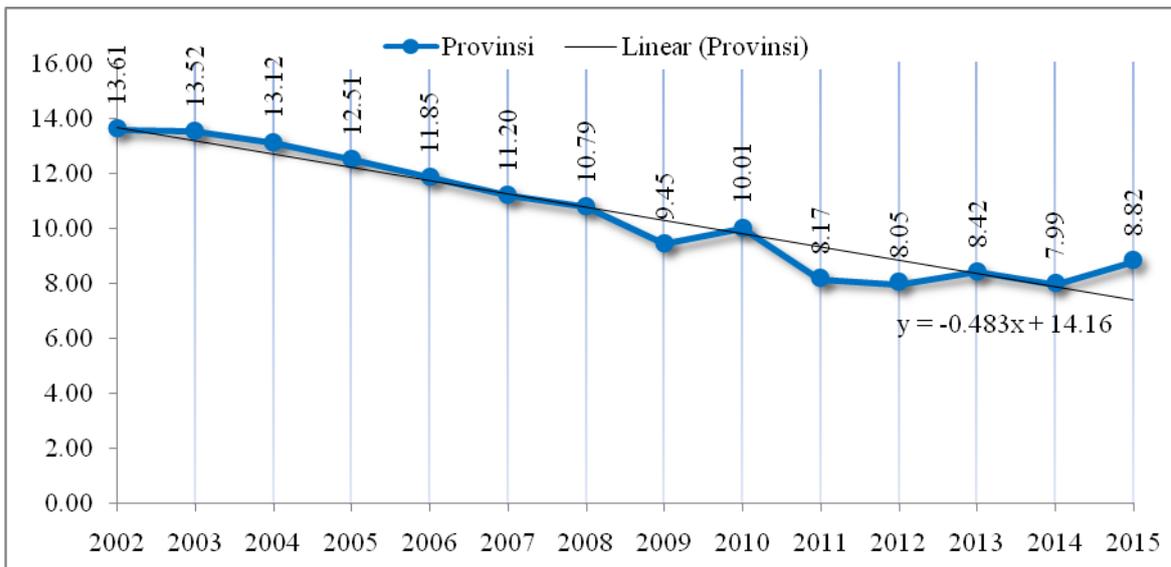
melangsungkan kehidupannya atau lebih tinggi jika dibandingkan GK nasional sebesar Rp 344.809. GK Provinsi Riau berada pada posisi ke 8 secara nasional. Artinya jika terjadi pergeseran atau perubahan terhadap harga pangan dan non pangan maka secara otomatis akan menambah jumlah penduduk miskin.



Gambar 5. Posisi Relatif Garis Kemiskinan Provinsi Riau 2015

b). Analisis Perkembangan Antar Waktu

Tingkat kemiskinan di Provinsi Riau menunjukkan trend penurunan. Pada tahun 2002 tingkat kemiskinan Provinsi Riau sebesar 13,61% dan terus mengalami penurunan menjadi 8,82% pada tahun 2015 (Gambar 6). Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan Provinsi Riau menunjukkan kemajuan dengan penurunan sebesar 4,54%.

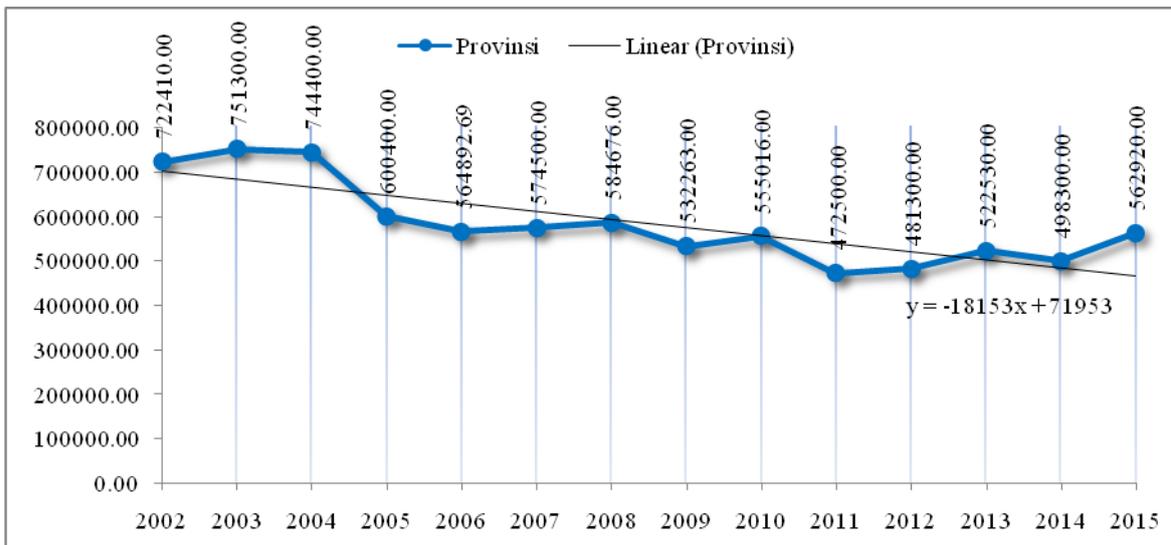


Gambar 6. Perkembangan Antara Waktu Tingkat Kemiskinan (%) Provinsi Riau Tahun 2002-2015

Walapun demikian pada tahun-tahun tertentu terjadi sedikit kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya seperti pada tahun 2010, 2013 dan 2015. Hal ini disebabkan oleh adanya faktor

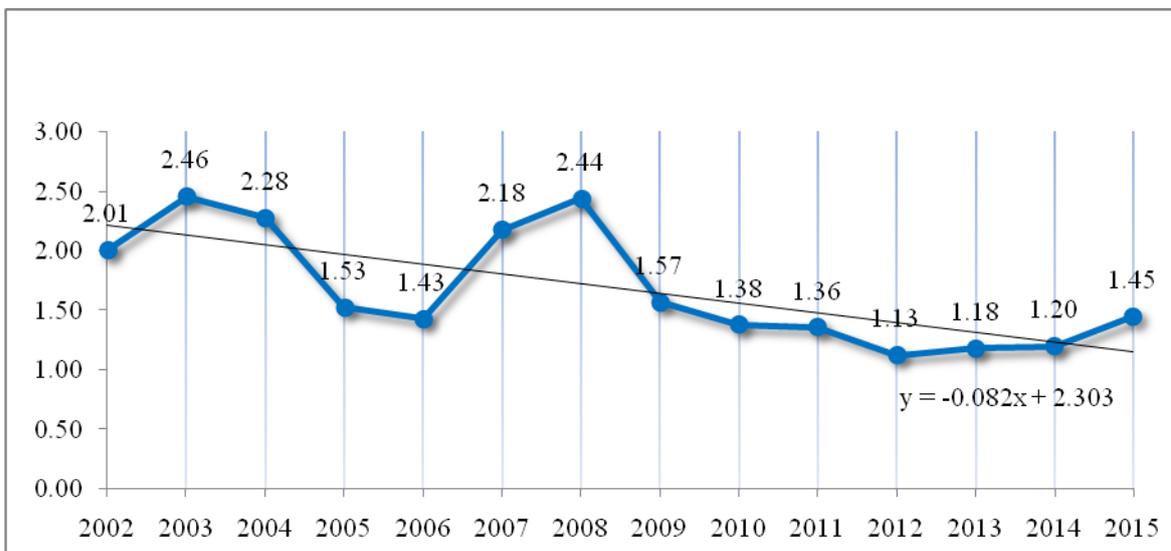
lain yang mempengaruhi terjadi kenaikan tersebut antara lain penurunan harga komoditas utama yang menjadi sumber utama pendapatan masyarakat dan kenaikan kenaikan harga bahan pokok kebutuhan masyarakat.

Gambar 6 menunjukkan selama periode tahun 2002-2015 tingkat kemiskinan menurun sebesar 33,98%. Kebijakan penanggulangan kemiskinan selama ini telah mampu menunjukkan perbaikan dengan koefisien variabel penurunan kemiskinan antara waktu sebesar -0,483. Sementara jika tanpa dilakukan usaha intervensi kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan maka angka kemiskinan akan berada pada posisi 14,16%.



Gambar 7. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) Provinsi Riau Tahun 2002-2015

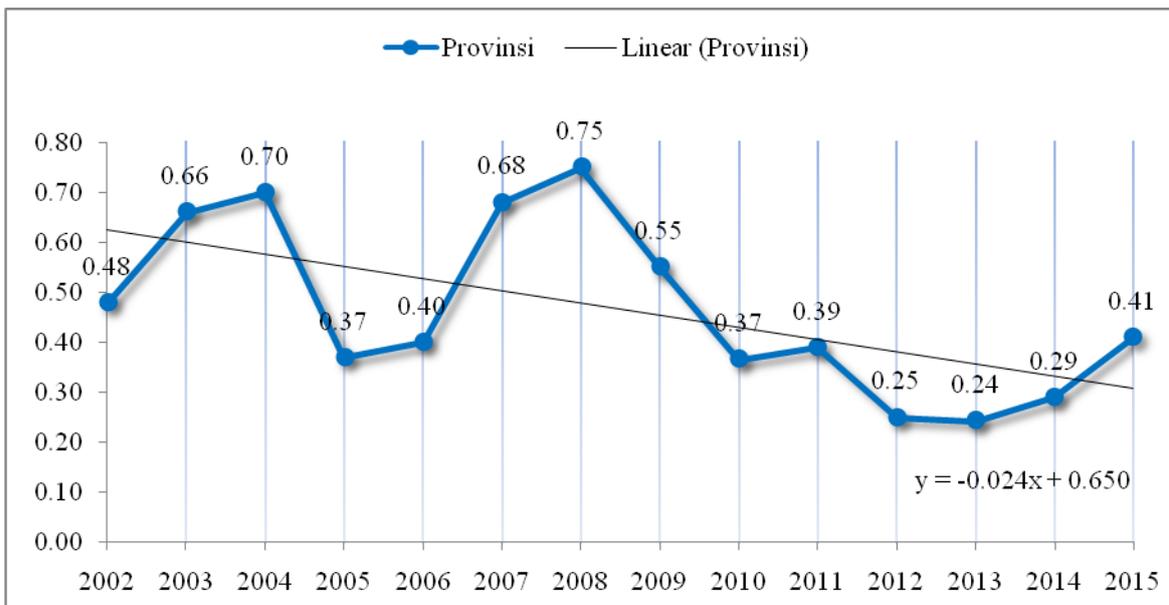
Gambar 7 terlihat bahwa Jumlah penduduk miskin Provinsi Riau terus mengalami penurunan selama periode 2002-2015. Pada tahun 2002 sebanyak 722.410 jiwa dan menurun menjadi 562.920 jiwa pada tahun 2015 atau berkurang sebanyak 159.490 jiwa. Namun selama periode tersebut pernah terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun 2002 yaitu pada tahun 2003 dan 2004 dengan jumlah penduduk miskin masing-masing 751.300 jiwa dan 744.400 jiwa. Sementara koefisien variabel pengurangan jumlah penduduk miskin jika dilakukan kebijakan intervensi dalam penanggulangan kemiskinan maka jumlah penduduk miskin akan berkurang sebanyak 18.153 jiwa per tahun.



Gambar 8. Perkembangan Antar Waktu Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Riau Tahun 2002-2015

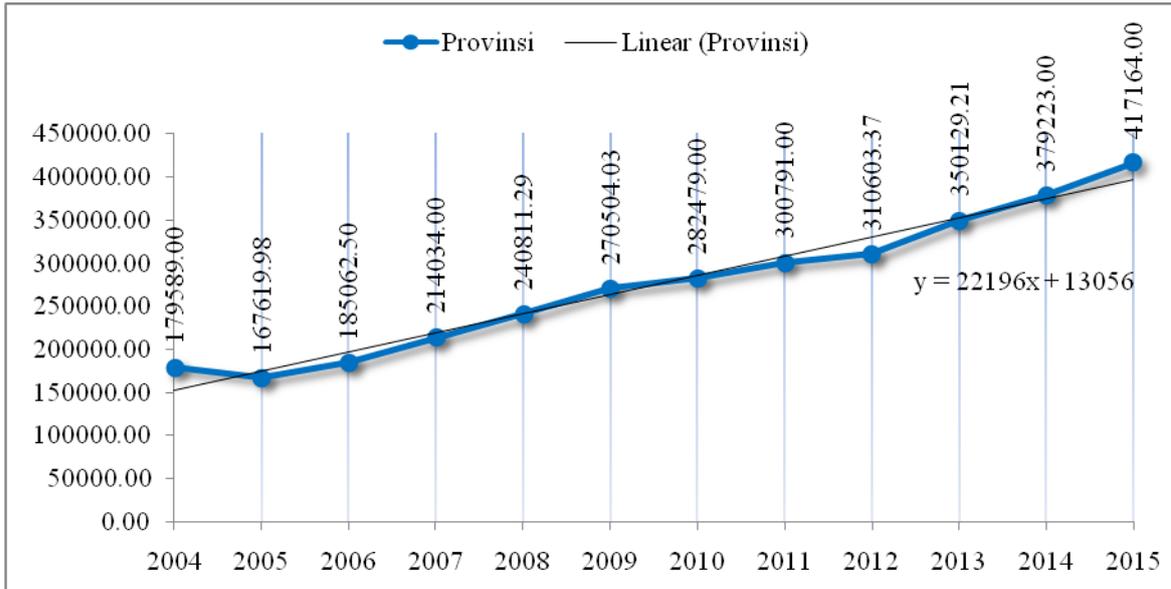
Sementara perkembangan indeks P1 Provinsi Riau antar waktu terus mengalami penurunan dari 2002 ke 2015. P1 provinsi Riau pada tahun 2002 sebesar 2,01% kemudian turun menjadi 1,45% pada tahun 2015. Gambar 8 menunjukkan bahwa indeks P1 Provinsi Riau pada tahun 2015 sebesar 1,45% berada dibawah (P1) nasional sebesar 1,84%. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kesenjangan rata-rata pengeluaran penduduk miskin Provinsi Riau lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat kesenjangan rata-rata pengeluaran penduduk miskin di tingkat nasional. Jika dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia, maka tingkat P1 Provinsi Riau berada pada posisi ke 10 terendah diantara 34 provinsi di Indonesia. Pada Gambar 8 dapat dilihat bahwa koefisien variabel penurunan P1 sebesar -0,082, artinya jika dilakukan kebijakan intervensi terhadap aspek pembentuk kemiskinan akan menurunkan angka kemiskinan sebesar -0,082 per tahun dari kondisi indeks P1 pada tahun 2015.

Perkembangan Indeks P2 memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin yang semakin membaik pada tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2002. Artinya penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin Provinsi Riau mengalami perbaikan selama periode tersebut. Hal ini dibuktikan oleh koefisien variabel penurunan P2 Provinsi Riau sebesar -0,024 selama periode 2002-2015. Namun jika tidak dilakukan kebijakan intervensi terhadap pembentuk P2 maka indeks P2 akan menjadi 0,650 pada tahun 2015.



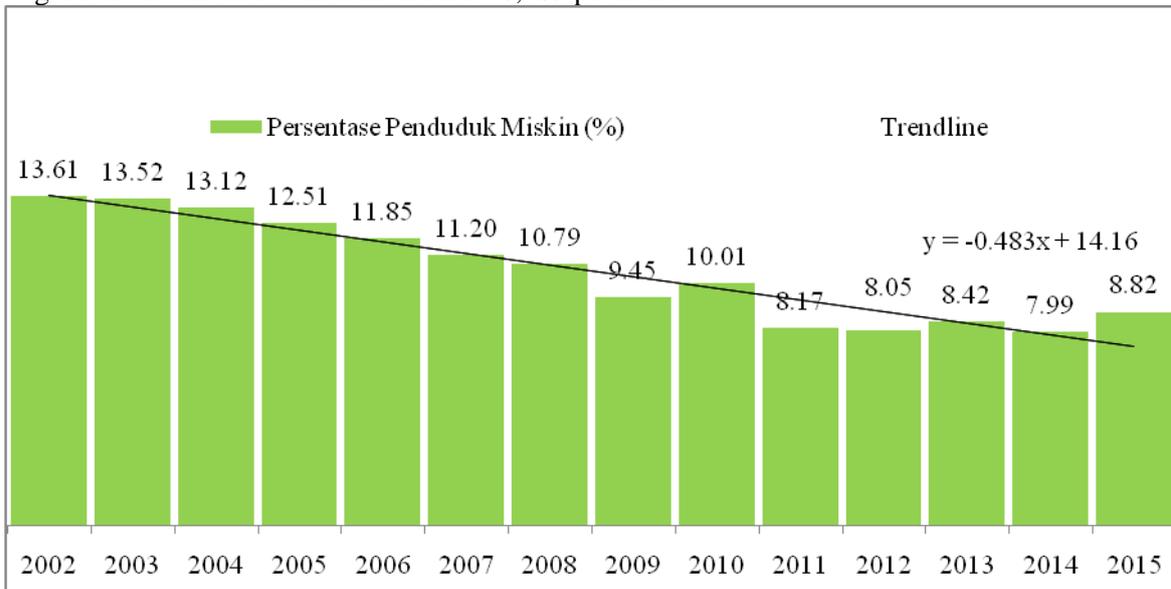
Gambar 9. Perkembangan Antara Waktu Indeks Keperahan Kemiskinan (P2) Provinsi Riau Tahun 2002-2015

Perkembangan angka GK provinsi Riau mengalami peningkatan dari Rp. 179.589 pada tahun 2004 meningkat menjadi Rp. 417.164 pada tahun 2015 dengan persentase peningkatan sebesar 132,29% selama periode 2004-2015. Artinya selama periode tersebut terjadi peningkatan harga terhadap kebutuhan konsumsi pangan setara dengan 2.100 kalori per kapita per hari dan non pangan sebesar 132,29% di provinsi Riau. Sementara GK nasional naik dari Rp. 122.775 pada tahun 2004 menjadi Rp. 344.809 pada tahun 2015 atau naik sebesar 180,85%. Hal ini mengindikasikan selama periode tersebut terjadi peningkatan harga terhadap kebutuhan konsumsi pangan setara dengan 2.100 kalori per kapita per hari dan non pangan sebesar 180,85% di Indonesia. Dari data GK provinsi Riau dan nasional tersebut menunjukkan bahwa persentase laju peningkatan GK provinsi Riau lebih rendah dibandingkan dengan nasional sebesar 48,56% selama periode 2004-2015.



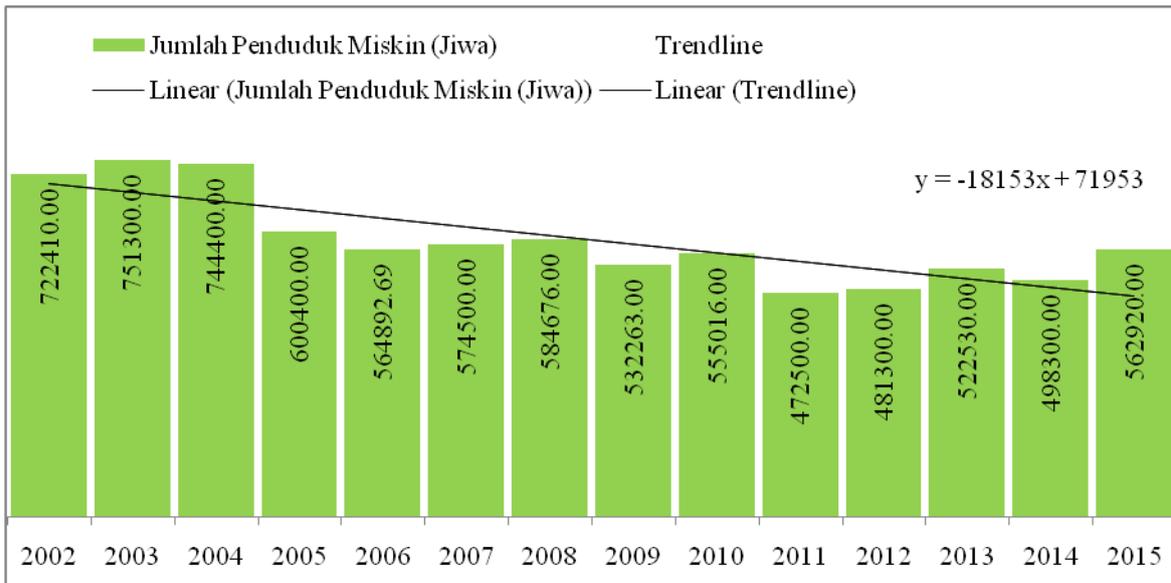
c). Analisis Efektifitas

Efektifitas penanganan penanggulangan tingkat kemiskinan Provinsi Riau dari tahun 2002-2015 cukup efektif dilihat kecenderungan *trendline* yang menurun dengan rata-rata penurunan tingkat kemiskinan Provinsi Riau sebesar -0,483 pertahun.



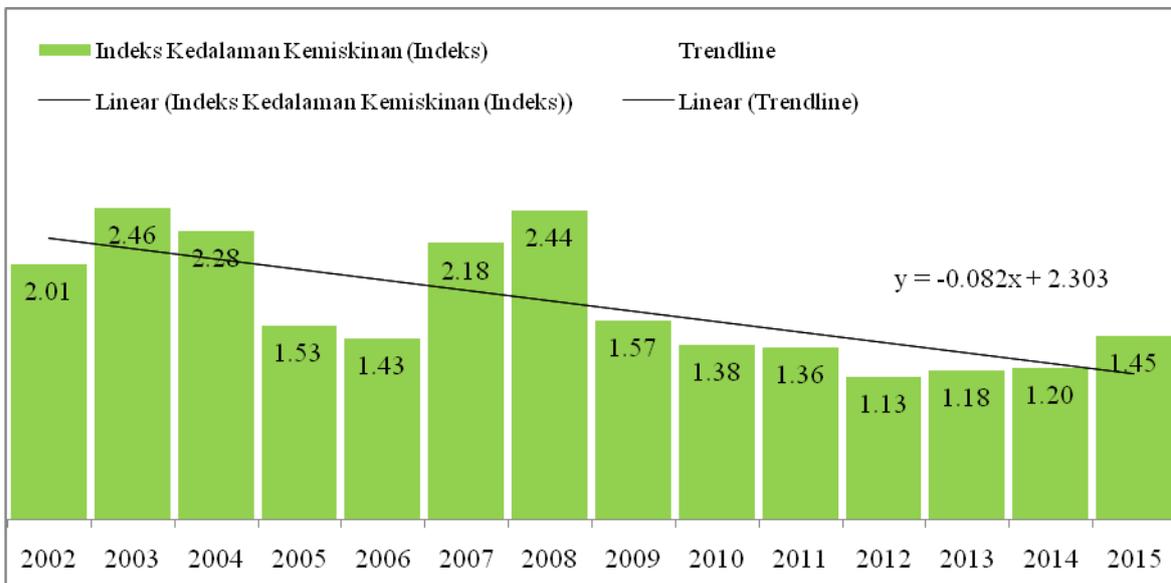
Gambar 11. Analisis Efektifitas Penanggulangan Tingkat Kemiskinan (%) Provinsi Riau Tahun 2002–2015

Analisis efektivitas penanggulangan jumlah penduduk miskin di Provinsi Riau dari tahun 2002-2015 cukup efektif (Gambar 12). Jumlah penduduk miskin di provinsi Riau pada tahun 2002 sebanyak 722.410 jiwa pada tahun 2015 menurun menjadi 562.920 jiwa dengan koefisien variabel tingkat efektifitas pengurangan jumlah penduduk miskin selama periode tersebut sebanyak 18.153 jiwa.



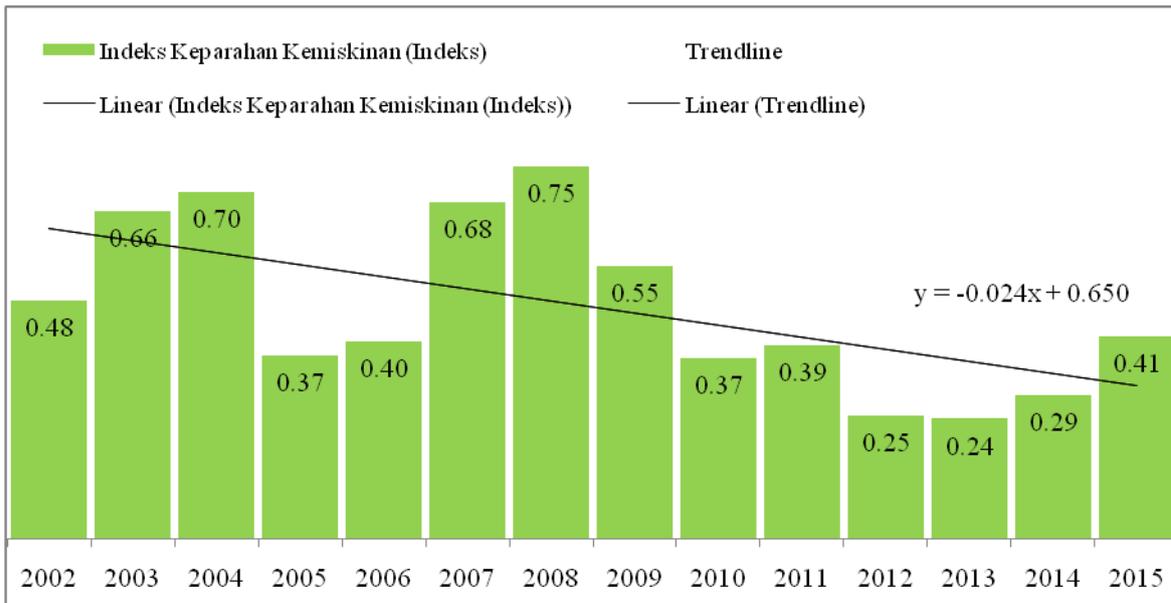
Gambar 12. Analisis Efektifitas Penanggulangan Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Riau Tahun 2002–2015

Analisis efektifitas P1 di provinsi Riau Riau selama periode 2002-2015 cenderung menurun atau efektif dalam dengan *trendline* penurunan sebesar 8,20%. Hal tersebut menunjukkan bahwa efektifitas intervensi kebijakan telah menghasilkan kemajuan dalam capaian indikator P1 Jelasnya dapat dilihat pada Gambar 13.



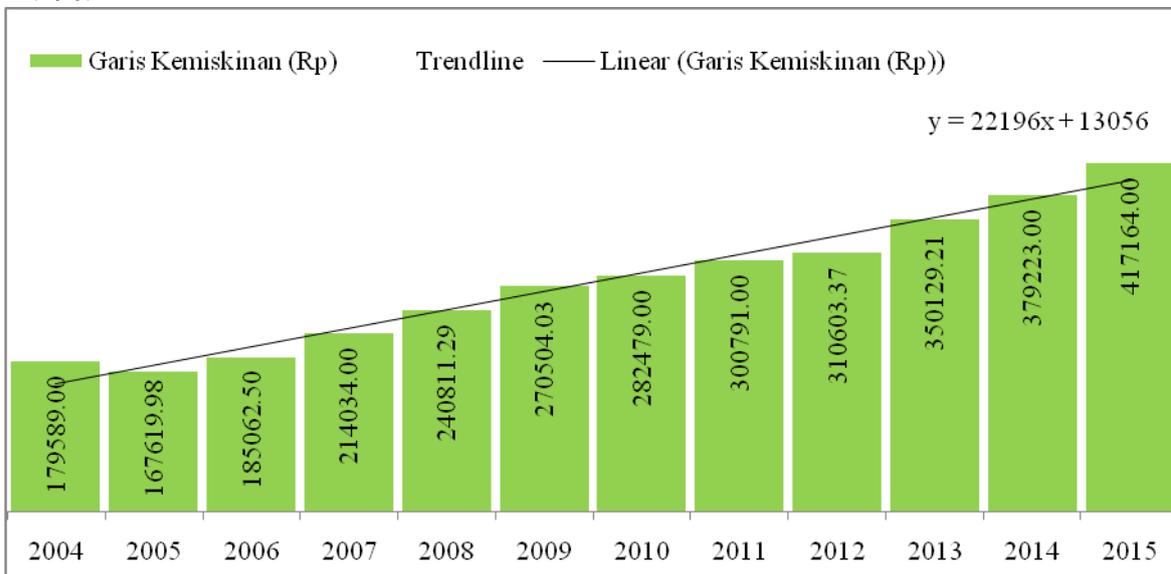
Gambar 13. Analisis Efektifitas Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Riau Tahun 2002–2015

Demikian halnya dengan analisis efektifitas penanggulangan kemiskinan dengan indeks P2 Provinsi Riau selama periode 2002-2015 cenderung menurun dengan koefisien variabel penurunan sebesar -0,024. Hal tersebut menunjukkan bahwa efektifitas kebijakan intervensi kebijakan telah menghasilkan kemajuan dalam capaian indikator P2.



Gambar 14. Analisis Efektifitas Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)Provinsi Riau Tahun 2002–2015

Sementara itu angka GK provinsi Riau mengalami peningkatan dari Rp. 179.589 pada tahun 2004 meningkat menjadi Rp. 417.164 pada tahun 2015. Sementara nasional naik dari Rp. 122.775 pada tahun 2004 menjadi Rp. 344.809 pada tahun 2015 atau meningkat sebesar 180,85%. Artinya persentase laju peningkatan GK provinsi Riau lebih rendah dibandingkan dengan nasional sebesar 48,56% selama periode 2004-2015 dengan koefisien variabel peningkatan GK sebesar Rp. 22.196.

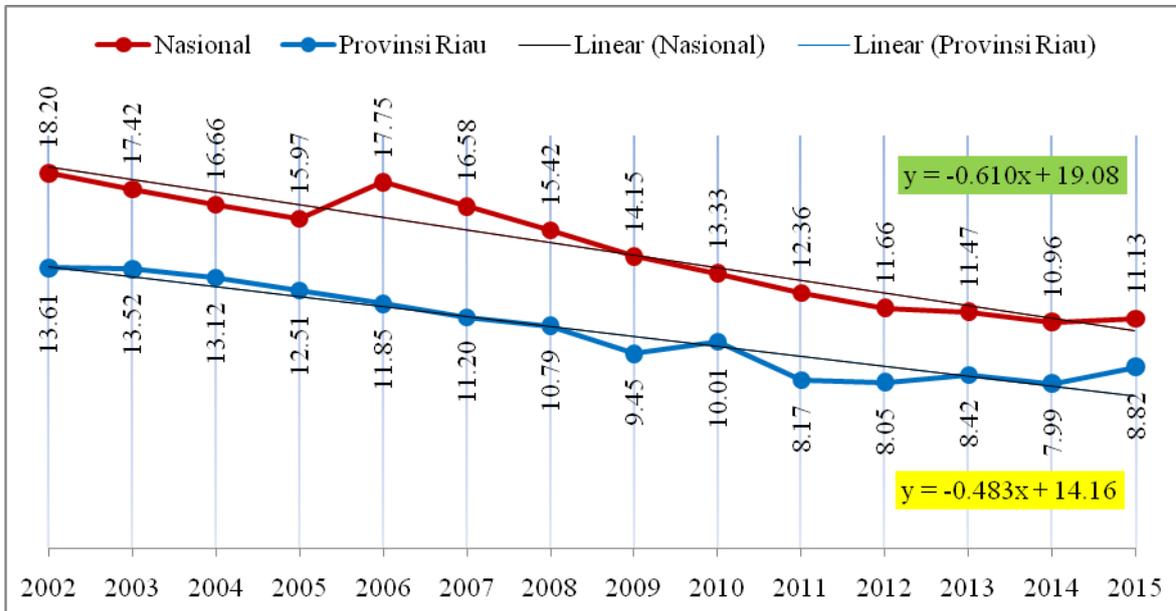


Gambar 15. Analisis Efektifitas Garis Kemiskinan (P2)Provinsi Riau Tahun 2002–2015

d). Analisis Relevansi

Analisis terhadap relevansi perkembangan tingkat penduduk miskin ditujukan untuk menilai sejauhmana pembangunan yang dijalankan di provinsi Riau dapat mendukung target nasional. Relevansi capaian suatu indikator kemiskinan Provinsi Riau terlihat sudah relevan dengan perkembangan capaian indikator nasional. Namun relevansi tersebut penurunan tingkat kemiskinan Provinsi Riau lebih rendah dibandingkan dengan nasional selama periode 2002-2015. Artinya trend penurunan tingkat kemiskinan nasional lebih cepat dibandingkan dengan trend penurunan kemiskinan Provinsi Riau. Hal tersebut dapat dilihat dari koefisien variabel penurunan tingkat

kemiskinan Provinsi Riau diperoleh -0,483, sedangkan tingkat nasional diperoleh sebesar -0,610 (Gambar 16). Hal ini mengindikasikan bahwa efektifitas upaya penanggulangan kemiskinan di tingkat nasional terhadap percepatan penurunan tingkat kemiskinan lebih efektif dibandingkan provinsi Riau.

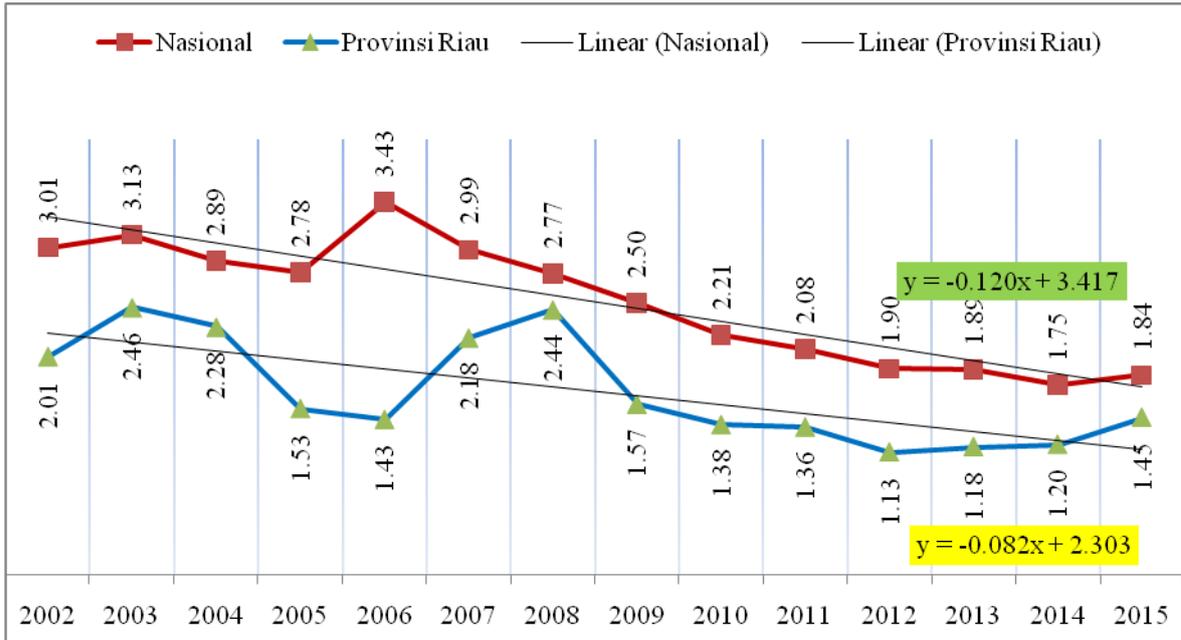


Gambar 16. Relevansi Penanggulangan Tingkat Kemiskinan (%) Provinsi Riau Terhadap Nasional Tahun 2002–2015

Relevansi penurunan P1 Provinsi Riau menunjukkan bahwa terjadi penurunan sudah relevan dengan upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan nasional. P1 Provinsi Riau berada lebih rendah dibandingkan dengan P1 nasional selama periode 2002-2014 (Gambar 17). Namun penurunan P1 di provinsi Riau lebih lambat jika dibandingkan dengan penurunan P1 nasional. Hal ini dapat dibuktikan dari analisis trend dengan analisis linear yang menghasilkan koefisien variabel indeks P1 provinsi Riau yang lebih kecil (-0,082) dibandingkan dengan P1 nasional (-0,120).

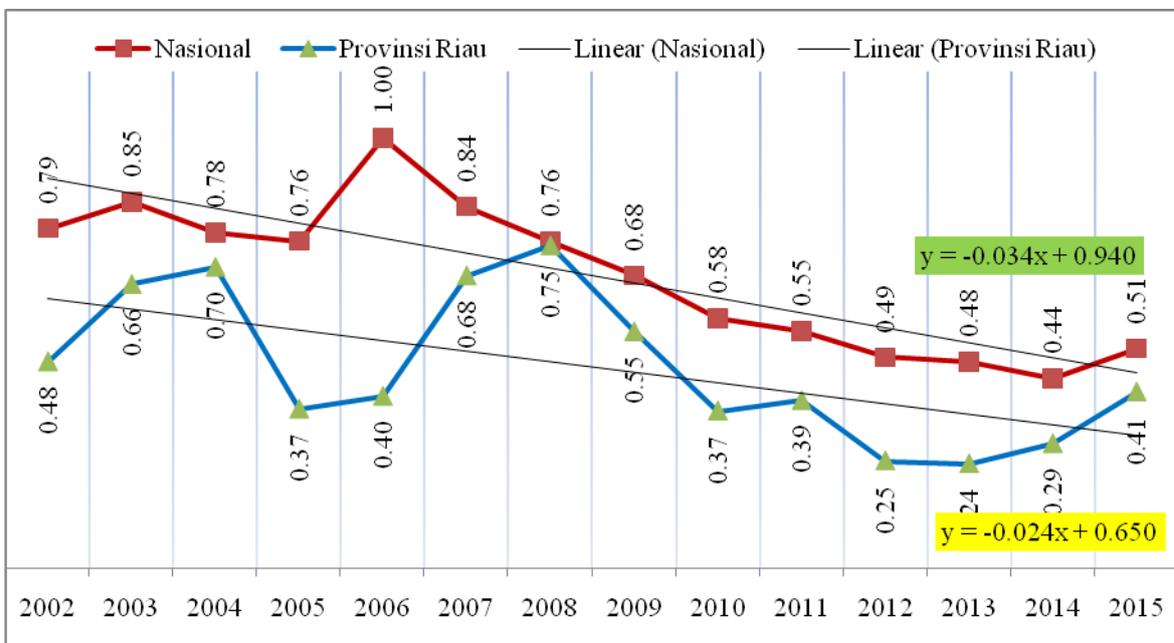
Selama periode 2002-2015 terjadinya fluktuasi relevansi kebijakan penurunan indeks P1, misalnya pada tahun 2006, relevannya intervensi kebijakan yang dilakukan provinsi Riau jika dibandingkan dengan nasional karena pada tahun tersebut indeks P1 provinsi Riau mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 1,53% pada tahun 2005 kemudian menurun menjadi 1,43% pada tahun 2006, namun secara nasional indeks P1 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 2,75% pada tahun 2005 naik menjadi 3,43% pada tahun 2006.

Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kesenjangan rata-rata pengeluaran penduduk miskin Provinsi Riau lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat kesenjangan rata-rata pengeluaran penduduk miskin nasional pada tahun tersebut. Kondisi tersebut terjadi karena adanya peningkatan kesenjangan rata-rata pengeluaran penduduk miskin nasional akibat dari beberapa wilayah provinsi yang lain mengalami perlambatan dalam penanganan penyebab peningkatan harga-harga pangan yang menjadi bahan konsumsi atau makanan dan non makanan penduduk.



Gambar 17. Relevansi Indeks Kedalaman Kemiskinan (%) Provinsi Riau Terhadap Nasional Tahun 2002–2015

Sementara itu analisis relevansi penurunan indeks P2 Provinsi Riau menunjukkan bahwa terjadi penurunan dengan trend yang relevan dengan penurunan indeks P2 nasional. P2 Provinsi Riau lebih rendah dibandingkan dengan P2 nasional selama periode 2002-2015 (Gambar 18). Namun penurunan indeks P2 Provinsi Riau lebih lambat jika dibandingkan dengan penurunan indeks P2 nasional. Hal tersebut dapat dilihat dari koefisien variabel penanggulangan indeks P2 provinsi Riau hanya akan berkurang sebesar -0,024 sementara nasional sebesar -0,034.



Gambar 18. Relevansi Indeks Keperahan Kemiskinan (%) Provinsi Riau Terhadap Nasional Tahun 2002–2015

Berdasarkan pada uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perkembangan kondisi kemiskinan provinsi Riau telah mengalami perbaikan selama periode 2002-2015, namun masih

Seminar Nasional “Mitigasi Dan Strategi Adaptasi Dampak Perubahan Iklim Di Indonesia”

perlu adanya kebijakan penanggulangan yang lebih efektif dan relevan dengan pemerintah pusat agar percepatan penanggulangan kemiskinan di provinsi Riau memberikan dampak yang signifikan terhadap pengurangan jumlah penduduk miskin. Berikut disajikan ringkasan hasil analisis pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1: Ringkasan Analisis Kondisi Kemiskinan Provinsi Riau Tahun 2015

Indikator	PERSPEKTIF			
	Posisi Relatif Tahun Terakhir	Perkembangan Antar Waktu	Efektifitas	Relevansi
Garis Kemiskinan (Rp)	R>N	R>N	R<N	R<N
Persentase Tingkat Kemiskinan (%)	R<N	R<N	R<N	R>N
Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	R<N	R<N	R<N	R<N
Indeks Kedalaman Kemiskinan (%)	R<N	R<N	R<N	R>N
Indek Keparahan Kemiskinan (%)	R<N	R<N	R<N	R>N

Keterangan:

1. R= Riau dan N= Nasional
2. Perkembangan antara waktu (>) berarti lebih baik (<) lebih buruk
3. Posisi relatif (>) lebih baik (<) lebih buruk
4. Relevansi (>) sangat relevan (<) tidak relevan
5. Efektifitas (>) efektif (<) tidak efektif

Berdasarkan pada Tabel 1 tersebut dapat dilihat bahwa GK provinsi Riau lebih tinggi dibandingkan dengan GK nasional, angka kemiskinan, indek kedalaman kemiskinan, indek keparahan kemiskinan Provinsi Riau lebih rendah dari nasional, namun dalam efektifitas penanggulangan kemiskinan provinsi Riau kurang efektif dibandingkan dengan nasional artinya provinsi perlu melakukan kebijakan intervensi yang lebih fokus dan lokus terutama terhadap indikator pendukung seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar, ketenagakerjaan dan pengembangan usaha yang kondisinya dibawah kinerja nasional. Walaupun perkembangan antara waktu, posisi relatif, intervensi dan efektifitas kebijakan penanggulangan kemiskinan mengalami perbaikan capaian indikator (warna hijau), namun relevansi kebijakan belum sepenuhnya selaras dengan target nasional sehingga harus menjadi prioritas dalam intervensi kebijakan (warna kuning).

Bila dianalisis lebih mendalam dengan membandingkan antara kabupaten kota di Provinsi Riau menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin, persentase tingkat kemiskinan, angka indeks P1, P2 dan GK terdapat perbedaan yang cukup signifikan sehingga memerlukan intervensi kebijakan. Pada Tabel 2 menunjukkan bahwa pada tahun 2015 persentase tingkat kemiskinan tertinggi terdapat di Kabupaten kep. Meranti yaitu sebesar 34,08%. Sementara jumlah penduduk miskin kemiskinan terbanyak terdapat di Kabupaten Kampar sebanyak 72.200 jiwa. Indeks P1 dan P1 tertinggi terdapat di Kabupaten Kep. Meranti masing-masing sebesar 6,63 dan 2,0. Sementara GK tertinggi terdapat di Kabupaten Pelalawan sebesar Rp. 451.528.

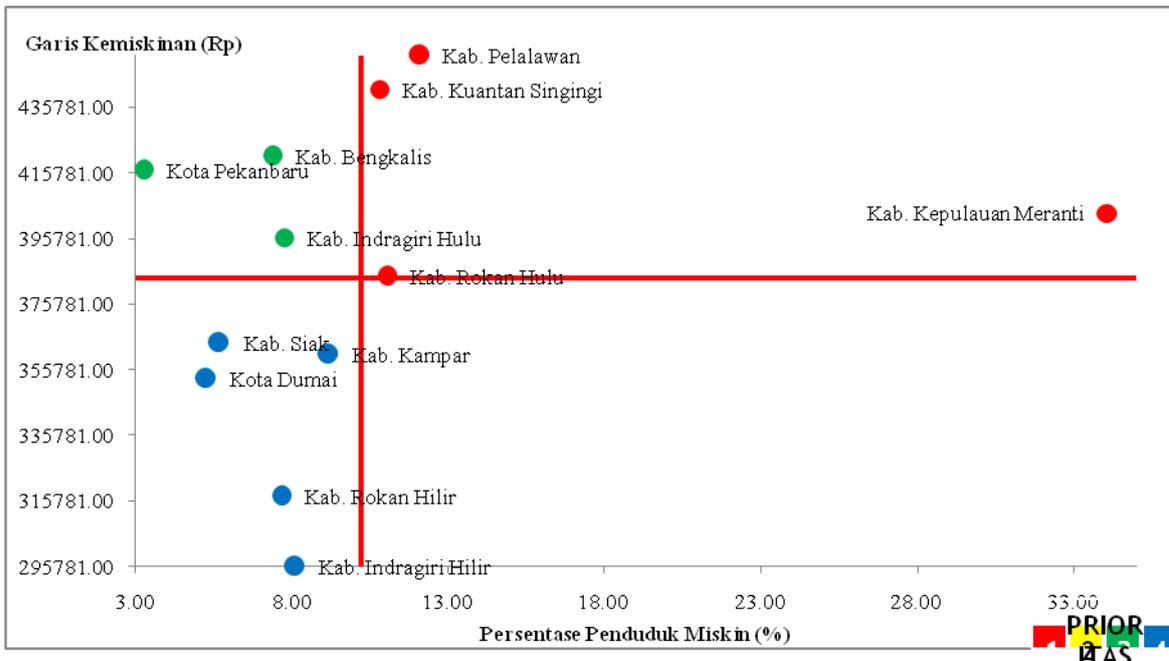
Tabel 2. Kondisi Kemiskinan Menurut Kabupaten Kota Provinsi Riau Tahun 2015

Kabupaten Kota	Indikator Kemiskinan				
	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Penduduk Miskin (%)	Indek Kedalaman Kemiskinan (P1 %)	Indek Keparahan Kemiskinan (P2 %)	Garis Kemiskinan (Rp)
Kep.Meranti	61.600	34,08	6,63	2,03	403.535
Pelalawan	47.500	12,09	2,38	0,65	451.528
Rokan Hulu	64.700	11,05	1,54	0,34	384.226
Kuantan Singingi	34.100	10,80	1,48	0,36	441.315
Kampar	72.200	9,17	1,41	0,32	360.324
Indragiri Hilir	56.900	8,11	1,45	0,40	295.781
Indragiri Hulu	31.600	7,76	1,22	0,36	396.088
Rokan Hilir	49.100	7,67	1,18	0,34	317.220
Bengkalis	40.000	7,38	1,05	0,25	420.733
Siak	24.800	5,67	0,64	0,12	363.879
Dumai	15.000	5,26	0,59	0,11	353.079
Pekanbaru	33.800	3,27	0,36	0,08	416.479
Provinsi Riau	562.920	8,82	1,45	0,41	417.164

Sumber: BPS Pusat Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten Kota, 2016

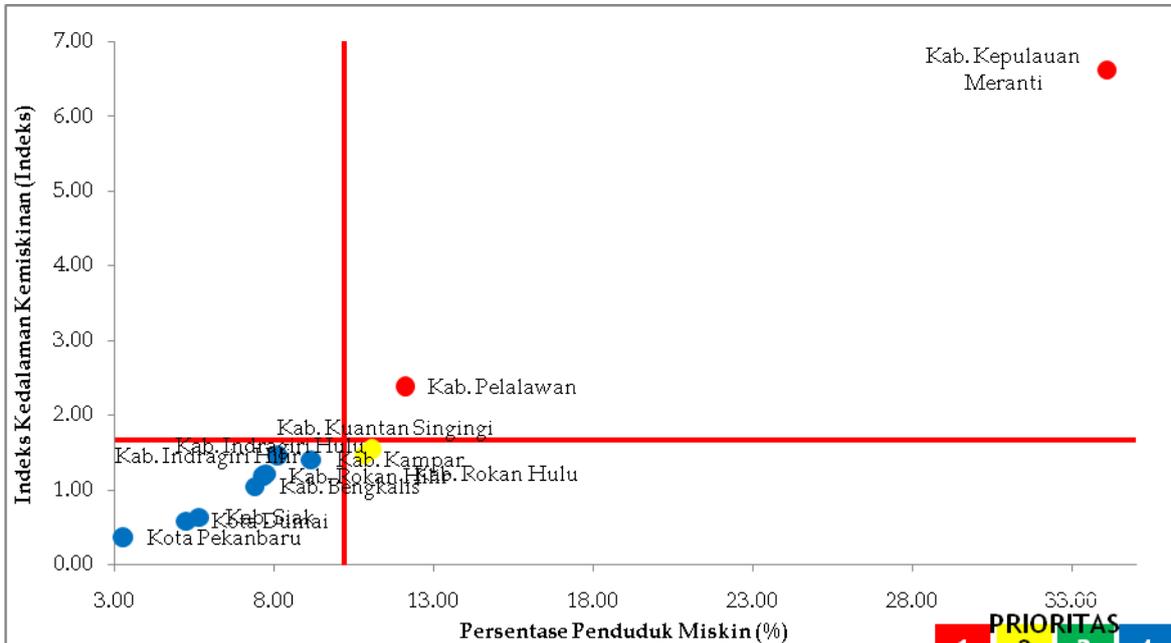
Secara umum jumlah penduduk miskin, tingkat kemiskinan, indek kedalaman dan keparahan kemiskinan di desa jauh lebih tinggi dibandingkan di kota, yang memberi arti bahwa kedalaman dan keparahan kemiskinan di pedesaan jauh lebih besar dibanding kota. Oleh karena itu, kebijakan penanggulangan kemiskinan masih perlu terus dilakukan dengan memperkuat di wilayah pembangunan sosial ekonomi dan infrastruktur khususnya pedesaan di wilayah pesisir.

Berdasarkan pada data kondisi kemiskinan kabupaten kota tersebut, maka wilayah kabupaten kota yang perlu mendapatkan prioritas utama dalam intervensi penanggulangan kemiskinan digambarkan sebagai berikut.



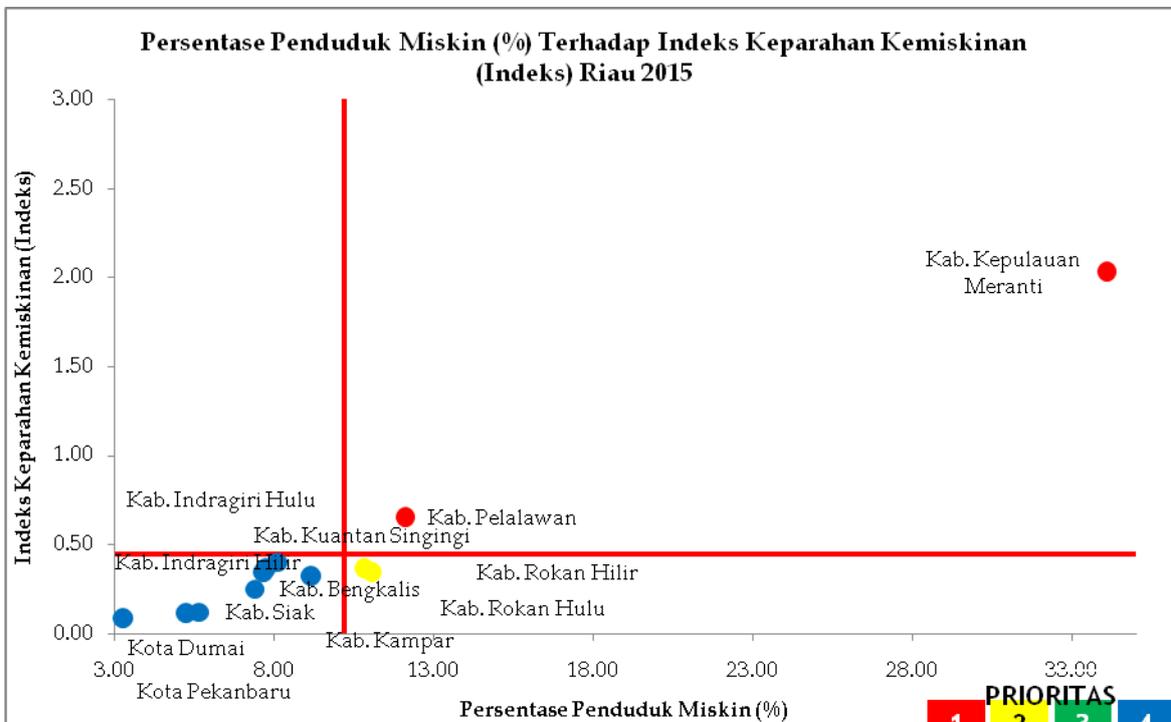
Gambar 19. Prioritas Intervensi Terhadap Garis Kemiskinan Kabupaten Kota Provinsi Riau 2015

Dari Gambar 19 tersebut menunjukkan bahwa wilayah yang perlu mendapatkan prioritas utama untuk diintervensi terkait dengan garis kemiskinan adalah Kabupaten Kepulauan Meranti, Pelalawan, Kuansing dan Rokan Hulu (lihat Warna Merah).



Gambar 20. Prioritas Intervensi Terhadap Indeks P1 Kabupaten Kota Provinsi Riau 2015

Dari Gambar 20 tersebut menunjukkan bahwa wilayah yang perlu mendapatkan prioritas utama untuk diintervensi terkait dengan indeks P1 adalah Kabupaten Kepulauan Meranti, dan Pelalawan (lihat Warna Merah).



Gambar 21. Prioritas Intervensi Terhadap Indeks P2 Kabupaten Kota Provinsi Riau 2015

Dari Gambar 20 tersebut menunjukkan bahwa wilayah yang perlu mendapatkan prioritas utama untuk diintervensi terkait dengan indeks P2 adalah Kabupaten Kepulauan Meranti, dan Pelalawan (lihat Warna Merah).

PENUTUP

Tingkat kemiskinan mengalami penurunan sebanyak 5,49% dari 13,61% pada tahun 2002 menjadi 8,82 pada tahun 2015 dan lebih rendah 2,31% dari tingkat kemiskinan nasional sebesar 11,13% dengan penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 159.490 orang dari 722.410 orang pada tahun 2002 menjadi 562.920 orang pada tahun 2015. Indeks kedalaman (P1) kemiskinan menurun dari 2,01 pada tahun 2002 menjadi 1.45 pada tahun 2015 dan lebih rendah dari P1 nasional sebesar 1,84%. Indeks keparahan (P2) pada tahun 2015 mencapai 0,41% dan lebih rendah dari P2 nasional sebesar 0,51%. Walaupun perkembangan antara waktu, posisi relatif, dan intervensi, efektifitas kebijakan penanggulangan kemiskinan mengalami perbaikan capaian indikator namun relevansi kebijakan belum sepenuhnya selaras dengan target nasional sehingga harus menjadi prioritas dalam intervensi kebijakan dalam strategi penanggulangan kemiskinan kedepan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni. AD.2009. Profil Rumah Tangga Miskin dan Faktor Determinan Kemiskinan Di Kabupaten Bogor (Studi Kasus Desa Jogjoga. Cisarua. Bogor). Thesis Magister Ekonomi. FE Universitas Indonesia. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik.2016. Profil Kemiskinan di Indonesia. Berita Resmi Statistik. Badan Pusat Statistik. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik.2011. Ensiklopedia Indikator Ekonomi dan Sosial. Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik. Badan Pusat Statitik. Jakarta.
- Bappenas.2016. Data Kemiskinan Indonesia Tahun 2016. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta.
- TNP2K.2011. Panduan Penanggulangan Kemiskinan. Buku Pegangan Resmi TKPK Daerah.. Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia. Jakarta.
- Todaro. MP and Smith. S.2012. Economic Development. Eleventh Edition. Published by Pearson. United State of America.